

Peta Kita, Server Asing: Bahaya Sunyi di Balik Tender BIG
Mafia Tanah, Celah Hukum dan Perilaku Oknum Aparat

fanzine **aktual.com**
TERHANGAT TERPERCAYA

A portrait of a man with dark hair, wearing a white traditional Indonesian shirt (Korpri). He has a pained or distressed expression, with his eyes closed and a furrowed brow. The background is a textured, light-colored wall with a pattern of soft, rounded shapes in shades of orange and yellow.

**PEWARIS DJARUM
TERTUSUK SKANDAL
PAJAK**

TEMUKAN INFORMASI DAN BERITA ANALISIS MENDALAM HANYA DI
WEBSITE BERITA NASIONAL :

aktual

TERHANGAT TERPERCAYA

MENYAJIKAN INFORMASI, PERISTIWA, DAN ANALISA POLITIK,
HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SETIAP SAAT
MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ANDA GUNA MEMBANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TEPAT DAN STRATEGIS

PARTNERSHIP : 0813-1019-7365

**Pengamat Kritisi Gaji DPR
Masih Rp65 Juta Meskipun
Tuntutan Demonstrasi Besar
Disepakati**

Oleh Eka Permadya @kawanpawani
WIB

**Was-was Antiklimaks Kasus
Nadiem Makarim di Keagungan**

**Hasrat Tameng
Kantong
Rincian**
7 September 2023



Ketika Peta Negeri Dipertaruhkan

Edisi ini dibuka dengan satu pertanyaan sederhana namun mengusik: apakah tender BIG sekadar proses administratif, atau penyerahan kontrol data ruang hidup bangsa ke pihak luar? Jika dapur data dikelola orang lain, apa jaminan rumah besarnya tetap milik kita?

Namun isu BIG bukan satu-satunya alarm. Ambisi mengolah sampah menjadi energi terbarukan masih menyisakan perdebatan: apakah benar solusi, atau justru masalah lingkungan baru yang dipoles teknologi?

Di ranah sosial-keagamaan, PBNU menghadapi turbulensi internal dengan tuntutan mundur terhadap Ketua Umum,

sentimen ideologi dan geopolitik makin terasa pekat.

Hukum pun bergerak. Kejaksaan membidik kasus pajak grup rokok besar, Djarum. Kabar Nusantara merangkul sengketa tanah menyeret nama Jusuf Kalla, dan rumah seorang hakim terbakar saat menangani perkara penting.

Dunia pun tak sunyi. COP30 memperlihatkan aroma gesekan negara maju dan berkembang soal tanggung jawab iklim. Dan di penghujung halaman, kami kembali pada sesuatu yang mendasar: akhlak dalam berdakwah. Di tengah hiruk wacana, akal dan nurani seharusnya tetap berjalan bersama.

Selamat membaca.

Daftar Isi

Laporan Utama	
· Peta Kita, Server Asing: Bahaya Sunyi di Balik Tender BIG	4
· Peta Nasional, Kuasa Siapa?	8
· Kemandirian Geospasial Dimulai dari Pemanfaatan SDM Nasional	10
· Asa Harapan Baru Kementerian Haji, Stop Korupsi yang Berulang!	14
Laporan Khusus	
· WtE: Pembangkit Sampah atau Pembangkit Masalah?	12
· Zulkifli Hasan Ungkap Alasan WtE Tertinggal dari Negara Tetangga	14
· Eddy Soeparno: Pembiayaan Proyek WtE Ditanggung Pelaku Usaha Bukan APBN	16
· Danantara Mulai Tender Teknologi Pengolahan Sampah Jadi Energi Empat Kota	18
Analisis	
Kasus Pajak Sentuh Pewaris Djarum	22
Wawancara	
Muhammad Sarmuji: Pondasi Pemerintahan Kuat, Tetapi Mesin Ekonomi Belum Menyalakan	24
Nasional	
· Reuni Akbar 212 Digelar Kembali di Monas, Panitia Undang Presiden Prabowo	27
· Mafia Tanah, Celah Hukum dan Perilaku Oknum Aparat	28
Nusantara	
Rehabilitasi Usai Vonis Eks Dirut ASDP	30
Dunia Aktual	
Aroma Perseteruan Negara Berkembang Vs Negara Maju di COP30 Brasil	31
Oase	
Kembali pada Esensi Dakwah yang Berbasis Akhlak	33

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pemimpin Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** Rizal Maulana Malik **Redaktur Liputan Khusus:** Eka Permedi, Eroby Jawi Fahmi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto, Achmat **Redaktur Medsos:** Al Jalli **Redaktur Videografis:** Saiful, Dany Candra Setiadi **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Eroby Jawi Fahmi, Achmat, Muhammad Khaldi (Pantura Pekalongan), Edy Gustan (Lombok), Ricky Setiawan **Kontributor:** Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Hary Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (Riau), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlica **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

Alamat Redaksi: Caprof Building Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com



Laporan
Utama

U



ara

Maluku Utara

Papua Barat Daya

Papua Barat

Maluku

Papua Tengah

Papua

Papua Per

PETA KITA, SERVER ASING: BAHAYA SUNYI DI BALIK TENDER BIG

Foto: BIG

Ketika data menjadi aset strategis dan peta menjadi bahasa kekuasaan modern, Indonesia justru membuka peluang bagi perusahaan asing, khususnya dari Tiongkok, untuk terlibat dalam tender penyediaan data geospasial nasional.

Proses yang dimulai sejak Juli 2025 di Badan Informasi Geospasial (BIG) ini memicu kekhawatiran karena dari delapan perusahaan yang lolos kualifikasi, sebagian besar merupakan entitas berbasis Tiongkok. Di tengah meningkatnya kesadaran global bahwa data adalah sumber daya baru, pertanyaan utamanya bukan lagi soal administrasi tender, melainkan kedaulatan data.

Kekhawatiran paling awal datang dari analisis kebijakan publik. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, menegaskan bahwa dominasi perusahaan Tiongkok dalam tender penyediaan data dasar geospasial berpotensi mengancam keamanan nasional.

“Masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam tender ini bisa

menimbulkan risiko besar jika data geospasial Indonesia jatuh ke tangan asing,” ujar Trubus, Rabu (12/11/2025).

Menurut Trubus, data spasial hari ini bukan sekadar visualisasi permukaan bumi. Ia adalah representasi struktur kekayaan negara, berupa jalur energi, sumber daya terpendam, kontur pertahanan, hingga titik objek vital yang tidak pernah dipublikasikan. Dengan kata lain, data geospasial adalah cetak biru negara.



foto: trisakti.ac.id

“Masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam tender ini bisa menimbulkan risiko besar jika data geospasial Indonesia jatuh ke tangan asing,”

“Kalau geospasial itu oleh pemenang tendernya antara orang Tiongkok, seluruh sumber daya alam kekayaan kita bisa terekam oleh Tiongkok semuanya nanti,” tambahnya.

Ia menilai risiko yang muncul bukan hanya pada akses awal data, tetapi juga pada pembaruan sistem pemetaan di masa depan. Vendor asing dapat menjadi satu-satunya jalur perawatan sistem, menciptakan ketergantungan teknologi yang sulit diputus.

Sementara dari perspektif keamanan, nada peringatannya lebih tegas. Sri Rajasa, pengamat

intelijen, menilai proyek ini tidak bisa diperlakukan sebagai tender teknologi biasa.

“Apapun kerja sama dengan delapan perusahaan Cina, tapi ketika menyangkut data geospasial itu kerawanannya tinggi,” tegas Sri Rajasa, Kamis (13/11/2025).

Sri menjelaskan bahwa perusahaan teknologi Tiongkok memiliki konsekuensi legal untuk menyediakan data kepada negara asalnya. Hal ini berarti akses tidak hanya dapat terjadi secara teknis, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan negara yang bersifat strategis.

Ia menyebut ancaman terbesar bukan pada fase pekerjaan, melainkan fase setelahnya, yaitu ketika pembaruan data, sinkronisasi sistem, dan perbaikan perangkat lunak dilakukan. Pada tahap itulah kontrol negara dapat melemah.

“Kalau itu dilakukan oleh perusahaan Cina, tentunya Cina tidak mau transfer teknologi. Kita akan terus bergantung. Ini bentuk model penajahan gaya baru,” tegasnya.

Isu ini pun memasuki ruang politik. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan bahwa tender ini tidak boleh dianggap sebagai rutinitas administrasi.

“Ini alarm bagi pemerintah, kalau kita sendiri tidak punya kapasitas memetakan negeri kita, maka kedaulatan digital kita rentan,”

katanya, Kamis (13/11/2025).

Dave memastikan Komisi I akan memanggil BIG serta meminta keterlibatan BSSN untuk memastikan bahwa data geospasial tetap berada dalam infrastruktur server nasional.

Di sisi lain, TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, menyoroti aspek implementasi regulasi. Menurutnya, terdapat Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dan Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi. Namun, menurutnya, yang penting adalah pembuktian, bukan janji.

“Apakah benar semua data disimpan di server nasional, dan tidak ada transfer lintas negara? Itu yang harus dipastikan,” tegasnya.

Pengamat geopolitik Hendrajit, menyebut konteks pemetaan geospasial lebih luas dari sekadar teknologi. Menurutnya, data adalah senjata penting setiap negara yang tidak bisa diumbar begitu saja. Dia mengibaratkan kunci rumah yang dititipkan kepada seorang pencuri yang tidak bisa menjamin keamanan rumah yang ditinggalkan.

“Sekarang, kekuasaan itu bentuknya digital. Kalau data itu jatuh ke tangan asing, sama saja kita membuka semua rahasia rumah kita sendiri,” kata Hendrajit.

Rizal Maulana Malik

RISIKO BESAR

JIKA DATA GEOSPASIAL JATUH KE TANGAN ASING



Soft Loan
Bank Dunia
± Rp 4T

Tender sejak
Juli 2025,
**8 Perusahaan Lolos. Mayoritas:
Asal Tiongkok**



RISIKO

- ▶ Akses ke data pertahanan
- ▶ Data SDA strategis
- ▶ Infrastruktur energi & telekomunikasi
- ▶ Potensi ketergantungan perangkat lunak
- ▶ Risiko transfer server lintas negara

“Ketergantungan teknologi adalah bentuk penjajahan model baru.”

Sri Rajasa (Pakar Intelijen)



“Risiko besar jika data geospasial jatuh ke tangan asing.”

Trubus Rahardiansyah (Pengamat Kebijakan Publik)



“Jika data jatuh ke asing, sama saja membuka semua rahasia rumah kita.”

Hendrajit



“Ini alarm bagi pemerintah.”

Dave Laksono



“Data harus tetap di server nasional.”

TB Hasanuddin



“INI BUKAN SEKADAR PETA.”
Ini tentang siapa yang punya kendali atas informasi strategis negeri ini: energi, tambang, jalur pertahanan, dan masa depan digital. Tender boleh berjalan, tetapi kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan!



foto: iStockphoto/maruedom

PETA NASIONAL, KUASA SIAPA?

Bayangkan sebuah negara yang luasnya hampir seukuran benua, tapi tidak mampu memetakan dirinya sendiri. Itulah ironi yang muncul ketika Badan Informasi Geospasial (BIG) membuka tender proyek pemetaan nasional senilai sekitar 238 juta dolar AS, dana fantastis yang berasal dari pinjaman lunak Bank Dunia. Proyek ini seharusnya menjadi tonggak kemampuan domestik dalam memetakan ruang hidupnya dari Sumatera hingga Papua, dari Rote hingga Miangas.

Namun, daftar peserta tender yang dirilis menunjukkan mayoritas perusahaan yang lolos berasal dari Tiongkok. Fakta itu kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan teknologi nasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave

Laksono, menanggapi situasi tersebut sebagai indikasi lemahnya industri dalam negeri. “Kami memahami ini proyek kerja sama Bank Dunia, jadi tendernya internasional. Tapi dominasi peserta dari Tiongkok menunjukkan lemahnya daya saing industri nasional di sektor geospasial,” kata politikus Golkar tersebut.

Pandangan itu sejalan dengan riset akademis yang lebih dulu terbit. Dalam jurnal prosiding Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi (ReTII) tahun 2018, yang dilakukan Immas Nurhayati, Budi Susetyo, Puspa Eosina, dan Indu Purnahayu. Mereka menyebut, bahwa beragam faktor menyebabkan daya saing industri geospasial di dalam negeri tidak mampu bersaing.

“Industri informasi geospasial di Indonesia masih berada pada fase berkembang dan belum mampu

bersaing secara mandiri karena keterbatasan kemampuan teknologi, sumber daya manusia, serta minimnya dukungan kebijakan jangka panjang,” tulis para peneliti dalam jurnal tersebut dikutip *Aktual.com*.

Penelitian itu juga menyoroti pola ketergantungan, khususnya pada perangkat teknologi impor yang ketiadaan transfer pengetahuan.

“Sebagian besar pelaku industri masih mengandalkan perangkat teknologi impor tanpa strategi hilirisasi atau transfer pengetahuan, sehingga daya saing nasional terhambat dan ketergantungan pada pihak asing terus berlanjut,” beber para peneliti dalam hasil risetnya.

Sementara itu, sejumlah pengamat melihat tender ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga risiko keamanan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa persoalan geospasial bukan sekedar pemanfaatan data teknis. Lebih dari itu, bahwa di dalam data tersebut terkandung informasi strategis yang mampu dimanfaatkan pihak lain.

“Data geospasial itu bukan data teknis, tapi aset pertahanan. Kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen atau ekonomi negara lain,” kata Trubus.

Pengamat intelijen Sri Rajasa memberikan penilaian lebih tajam.

Ia mengatakan, bahwa sangat rentan ketika data geospasial jatuh ke tangan asing.

“Jadi begini, apapun kerja sama dengan delapan perusahaan Cina, tapi ketika menyangkut data geospasial itu kerawanannya tinggi. Karena kita lihat bagaimana strateginya Cina hari ini, itu adalah dengan mengedepankan hegemoni,” kata Sri.

“Setiap perusahaan Cina punya afiliasi dengan pemerintahnya. Artinya data kita bisa jadi bocor,” dia menambahkan.

Menurut Sri, penggunaan vendor asing dalam proyek inti seperti ini meningkatkan risiko ketergantungan jangka panjang. Senada dengan hasil riset yang dilakukan peneliti.

“Kalau itu dilakukan oleh perusahaan Cina, tentunya Cina tidak mau transfer teknologi. Kita akan terus bergantung. Ini bentuk model penjajahan gaya baru,” tegasnya.

Faktor lain yang membuat tender ini menjadi sorotan adalah rekam jejak institusinya. Pada Januari 2021, KPK menetapkan mantan Kepala BIG Priyadi Kardono dan pejabat LAPAN Muchamad Muchlis sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi bernilai Rp179,1 miliar. Modusnya adalah proyek tersebut diduga direkayasa sejak penyusunan dokumen agar menguntungkan pihak tertentu.

Rizal Maulana Malik



Foto: BIG

Kemandirian Geospasial Dimulai dari Pemanfaatan SDM Nasional

Pakar geospasial dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ketut Wikantika menilai pemerintah harus menjadikan alih teknologi sebagai syarat penting dalam proyek penyediaan data dasar geospasial nasional yang saat ini sedang melalui proses tender di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menurutnya, kapasitas sumber daya manusia (SDM) geospasial di Indonesia sudah jauh berkembang dan sudah mampu mengambil peran besar

dalam pekerjaan penyediaan peta dasar seluruh wilayah Indonesia.

“Pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang dimiliki SDM Indonesia sudah sangat banyak dan beragam. Ini waktu yang tepat untuk mengambil peran lebih besar,” kata Wikantika saat dihubungi wartawan, Kamis (20/11/2025).

Namun ia menyoroti potensi keterlibatan vendor asing dalam proyek tersebut. Jika vendor internasional memenangkan tender, ia menegakkan keterlibatan SDM

Indonesia harus dipastikan tetap berjalan pada semua tahap pekerjaan, mulai dari teknis hingga evaluasi.

“Biasanya vendor internasional akan bekerja sama dengan mitra lokal atau perguruan tinggi dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan adanya transfer teknologi yang nyata dari proses tersebut,” ujarnya.

Selain alih teknologi, Wikantika juga menyoroti aspek keamanan data. Ia menilai produksi data geospasial berskala nasional tidak hanya memerlukan kualitas teknis, tetapi juga pengamanan ketat terhadap potensi kebocoran.

“Di era digital, data sangat rentan. Ada potensi kebocoran jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kepastian soal keamanan data harus jelas,” katanya.

BIG diketahui sedang menyiapkan proyek besar penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah Indonesia sebagai bagian dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Proyek tersebut didanai melalui mekanisme pinjaman lunak Bank Dunia senilai kurang lebih USD238 juta atau sekitar



foto: gisact.io

“Pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang dimiliki SDM Indonesia sudah sangat banyak dan beragam. Ini waktu yang tepat untuk mengambil peran lebih besar,”

Rp4 triliun.

Tender dibagi menjadi dua kategori pekerjaan, yakni urban dan non-urban. Untuk wilayah urban terdapat empat paket pekerjaan yang mencakup Kalimantan–Yogyakarta, Sumatra, Jawa, serta kombinasi wilayah Jawa Timur, Bali, Maluku dan Papua.

Sementara untuk wilayah non-urban terdapat empat lot pekerjaan yang meliputi Kalimantan, Sumatra,

kawasan Jawa–Bali hingga Papua Barat, serta wilayah Papua lainnya.

Proyek ini menargetkan tersedianya data geospasial skala besar dan *base maps* untuk mendukung tata ruang nasional, pertahanan, kebencanaan, transportasi, hingga kebijakan berbasis spasial lintas sektor.

Wikantika menekankan bahwa keberhasilan proyek ini tidak boleh hanya dilihat dari *output* peta yang dihasilkan, melainkan dari kemampuan Indonesia untuk mandiri di masa depan.

“Kalau hanya membeli produk jadi, kita akan bergantung. Tetapi jika ada transfer teknologi, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa sepenuhnya mandiri,” ucapnya.

Rizal Maulana Malik



Foto: Ambara/Anis Wasita

WtE: Pembangkit Sampah atau Pembangkit Masalah?

WtE atau PLTSa tengah menjadi perdebatan besar di Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan energi alternatif, sehingga dianggap sebagai solusi cepat untuk krisis sampah di berbagai kota. Namun, sejumlah pihak menilai pendekatan ini terlalu tergesa-gesa dan belum mempertimbangkan kesiapan sistem pengelolaan sampah nasional.

Kritik terbesar datang dari perspektif tata kelola sampah. PLTSa dinilai bisa menjadi solusi instan yang justru mengabaikan prinsip utama pengelolaan sampah, yaitu pengurangan, pemilahan, dan daur ulang. Jika pemilahan tidak berjalan, sampah bercampur dengan kadar organik tinggi akan menyulitkan proses pembakaran dan mengurangi efisiensi pembangkit.

Mengutip laman *waste4change.com*, tantangan teknis dan operasional juga tidak kecil. Biaya teknologi tinggi, standar emisi ketat, serta kebutuhan pasokan sampah dengan spesifikasi tertentu membuat PLTSa berisiko berhenti beroperasi

jika sistem pendukung tidak disiapkan sejak awal. Tanpa fondasi yang kuat, PLTSa bukan hanya sulit berfungsi, tetapi dapat memunculkan ilusi solusi.

Contoh dari India menjadi peringatan penting. Fasilitas Ghazipur di Delhi yang dirancang mengolah 2.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 12 MW listrik justru menuai kritik karena kebakaran berulang, kelebihan kapasitas, dan keluhan warga mengenai polusi. Evaluasi menunjukkan masalah utama bukan teknologinya, melainkan kualitas sampah yang tidak dipilah sehingga tidak sesuai untuk WtE.

Sejumlah pabrik WtE di India bahkan tidak beroperasi penuh karena pasokan sampah tidak memenuhi standar teknis. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tanpa pemilahan dari sumber, regulasi emisi yang ketat, dan tata kelola yang matang, PLTSa dapat berubah menjadi fasilitas mahal yang tidak efektif dan memicu penolakan publik, alih-alih menjadi solusi berkelanjutan untuk persoalan sampah.

Eka Permadhi & Nur Aida Nasution



Foto: aktual.com

Zulkifli Hasan Ungkap Alasan WtE Tertinggal dari Negara Tetangga

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa proyek *Waste to Energy* (WtE) atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia telah berlangsung selama 11 tahun, namun realisasinya

terkendala proses birokrasi yang panjang.

Zulkifli pun mengungkapkan, kondisi tersebut yang menjadikan selama lebih dari satu dekade, hanya sedikit proyek WtE yang berhasil dan berjalan.



“Dalam 11 tahun ini, hanya ada tiga kesepakatan yang berjalan, satu di Surabaya dan satu di Solo,” ujarnya dalam forum *Waste to Energy Investment 2025* di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan aturan pengolahan sampah menjadi energi. Beleid ini juga menetapkan tarif listrik dari sampah sebesar 20 sen per kWh sebagai

insentif untuk investor.

Meski regulasi sudah dipermudah, Zulkifli menilai proses di lapangan masih berbelit-belit. Salah satu hambatan berada di tingkat daerah, di mana persetujuan *tipping fee* sering terpengaruh dinamika politik dan pergantian anggota DPRD.

Setelah persetujuan dari daerah diperoleh, pelaku usaha masih harus melalui proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM sebelum dapat bernegosiasi dengan PLN.

“Barulah setelah itu pengusaha bisa melanjutkan proyek,” kata Ketua Umum PAN.

Ia juga menyebut Indonesia tertinggal dalam pemanfaatan teknologi WtE dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok yang telah menerapkannya puluhan tahun lalu. Karena itu, percepatan adopsi teknologi dinilai penting untuk mengatasi masalah sampah nasional.

Kendati banyak hambatan, Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi agar proyek WtE dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Eka Permadhi & Nur Aida Nasution

Eddy Soeparno: Pembiayaan Proyek WtE Ditanggung Pelaku Usaha Bukan APBN

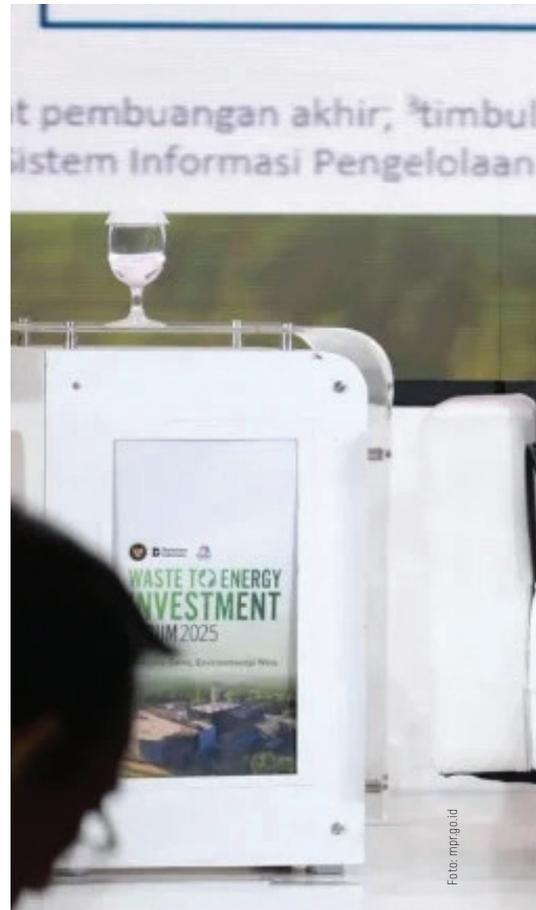
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memastikan bahwa proyek *waste to energy* (WtE), atau teknologi pengolahan sampah untuk mengubah limbah menjadi energi, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah, menurutnya, telah merancang proyek tersebut dengan melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung biaya utama.

“Seluruh pembiayaan untuk proyek ini akan ditanggung oleh pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah,” ujarnya usai acara *Waste to Energy Investment Forum 2025*, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia mengungkapkan, lebih dari 20 investor telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

“Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari proyek ini, termasuk



pendapatan dari penjualan energi, akan sangat mendukung perekonomian negara,” kata politikus PAN ini.

Saat ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan percepatan pembangunan WtE melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

“Perpres 109/2025 memberikan kepastian hukum dan akan



mempercepat implementasi proyek ini di tujuh wilayah prioritas,” tambah Eddy.

Tujuh wilayah prioritas tersebut meliputi daerah yang memiliki beban sampah besar, seperti Bogor dan Tangerang. Eddy menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan koordinasi yang baik antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan

berbagai pihak terkait.

Ia berharap pada 2028 Indonesia mampu mengelola sedikitnya 50 persen dari total sampah nasional. “Teknologi WtE akan membantu mengurangi dampak negatif sampah serta memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan ini,” ujarnya.

Eka Permadhi & Nur Aida Nasution



Danantara Mulai Tender Teknologi Pengolahan Sampah Jadi Energi Empat Kota

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia telah memulai proses tender untuk implementasi teknologi dalam proyek waste-to-energy (WtE). Proyek ini merupakan pengadaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, sebagaimana digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tender kali ini merupakan pengadaan teknologi WtE untuk

empat kota: Bogor, Bekasi, Denpasar, dan Yogyakarta. Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menjelaskan bahwa empat kota tersebut dipilih setelah melalui proses pengecekan kelayakan.

“Tender sudah dimulai di empat kota yang kami review, yaitu Bogor, Bekasi, Denpasar, dan Yogyakarta,” ujar Stefanus usai acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di



Foto: aktual.com

Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Proses tender akan dilakukan dalam dua tahap, dengan dua kota pertama diharapkan dapat mengajukan proposal pada awal Januari 2026. Dua kota lainnya diperkirakan menyusul dalam waktu satu minggu setelahnya.

Selain menekankan pentingnya emisi yang ramah lingkungan, Danatara juga mencari teknologi yang dapat memberi manfaat jangka

panjang bagi pengelolaan sampah.

“Kami ingin teknologi yang memenuhi standar Eropa, dan itu akan berlaku untuk semua kota yang terlibat,” jelasnya.

Saat ini lebih dari 200 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti tender, dengan 60 di antaranya mengajukan aplikasi resmi. Dari jumlah tersebut, 24 penyedia teknologi terpilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Stefanus menambahkan bahwa Danatara memberikan keleluasaan bagi investor untuk memilih kota yang ingin diikuti dalam proses tender.

“Kami tidak membatasi peserta untuk hanya mengikuti satu kota; mereka bebas memilih,” katanya.

Ia optimistis, tender ini akan memberikan dampak positif bagi empat kota dari tujuh kota yang dipilih untuk proyek tahap awal.

“Kami berharap tender ini dapat berlanjut di tiga kota lainnya sehingga target tujuh kota bisa tercapai,” ujarnya.

Sebagai bagian dari program nasional, proyek WtE diprioritaskan untuk kota-kota dengan volume sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Pemerintah daerah juga diwajibkan menyediakan lahan minimal lima hektare dan memastikan sistem pendukung, termasuk logistik pengangkutan sampah, berjalan dengan baik.

Eka Permadhi & Nur Aida Nasution

PBNU Resmi Copot Gus Yahya dari Jabatan Ketua Umum

Kontroversi terkait dugaan keterlibatan tokoh asing pro-Zionis dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya muncul desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri, kini keputusan resmi pemberhentian telah diterbitkan melalui surat edaran PBNU bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh struktur organisasi, mulai dari Pengurus Besar hingga Pengurus Cabang se-Indonesia. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pada 21 November 2025, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir menyerahkan risalah keputusan Rapat Harian Syuriyah kepada Gus Yahya di Hotel Mercure Ancol.

Selanjutnya, pada 23 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya disebut telah membaca surat bernomor 4779/PB.02/A.I.02.71/99/11/2025 mengenai penetapan hasil keputusan



Foto: Docu PBNU

rapat dimaksud.

Berdasarkan poin tersebut, PBNU menyatakan bahwa syarat administratif dan prosedural dianggap terpenuhi, sehingga keputusan final ditegaskan di dalam surat edaran:

“KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” isi surat edaran tersebut.

Surat edaran juga menegaskan bahwa sejak keputusan berlaku, Gus Yahya tidak lagi memiliki hak menggunakan atribut, fasilitas, maupun kewenangan apa pun yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU.

Lebih jauh, PBNU memastikan

bahwa selama masa kekosongan jabatan, kepemimpinan organisasi sepenuhnya berada di tangan Rais Aam PBNU, dalam hal ini KH Miftachul Akhyar, sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Meski demikian, surat edaran juga membuka ruang keberatan melalui jalur formal. Gus Yahya disebut memiliki hak mengajukan permohonan keberatan kepada Majelis Taklim PBNU jika tidak menerima keputusan tersebut.

Sebelumnya, Gus Yahya dalam

beberapa pernyataan publik menyatakan tidak memiliki niat untuk mundur dan mengklaim masih mendapat dukungan dari sebagian besar PWNU. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi darinya terkait keputusan terbaru ini.

Konflik internal PBNU kini memasuki fase kritis. Pertemuan lanjutan antara para kiai sepuh, PWNU, dan PCNU se-Indonesia dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat untuk merumuskan langkah organisatoris berikutnya.

Rizky Zulkarnain

Latar Belakang Polemik

Pemicu: Kegiatan AKN NU menghadirkan narasumber asing yang disebut terkait jaringan Zionisme internasional.

- ✗ Dinilai melanggar nilai organisasi dan Pasal 8 huruf a ART PBNU.
- ✗ Menimbulkan reaksi internal, termasuk dari jajaran Syuriyah PBNU.

Isi Risalah Syuriyah PBNU

Tuntutan: "KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari."

Konsekuensi jika tidak mundur:

- ✗ Ketua Umum akan diberhentikan oleh Rapat Harian Syuriyah PBNU.
- ✗ Risalah beredar luas dan memicu eskalasi opini publik.

Tindakan Lanjut

SK penunjukan Charles Holland Taylor, penasehat khusus Ketum PBNU, dicabut. Taylor disebut berperan mengundang narasumber pro-Israel di AKN NU. Pencopotan ditandatangani KH Miftachul Akhyar (Rais Aam PBNU).



"Kontroversi Zionis
Mengguncang PBNU"

**GUS YAHYA
MENOLAK
MUNDUR**



RESPON TEGAS GUS YAHYA

"Saya sama sekali tidak terbesit dalam pikiran saya untuk mundur."

"Tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada."

Klaim dukungan:

"Sebagian besar PWNU se-Indonesia tidak menghendaki saya mundur."

Kasus Pajak Sentuh Pewaris Djarum

Di negara yang menempatkan pajak sebagai urat nadi pembangunan, ada ironi yang kini bergulir di ruang publik. Ironi di mana dua nama besar yang dulu berada di sisi berbeda meja, kini berdiri di posisi yang sama. Keduanya diminta hadir, diperiksa, dan dicegah bepergian ke luar negeri karena dugaan rekayasa kewajiban pajak.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencekal Direktur Utama sekaligus pewaris konglomerasi PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, terkait dugaan rekayasa kewajiban pembayaran pajak

korporasi. PENCEKALAN berlaku selama enam bulan, mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

Pencekalan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Victor. Berdasarkan dokumen resmi kejaksaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, empat nama lain turut dicekal, yakni Ken Dwijugasteadi (Dirjen Pajak 2016–2017), Karl Layman (Pemeriksa Pajak Muda DJP), Bernadette Ning Dijah Prananingrum (Kepala KPP Madya Dua Semarang), dan Heru Budijanto Prabowo (konsultan pajak). Dalam keterangan dokumen yang diterima menyebut alasan pencekalan adalah:

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dalam pernyataannya menegaskan permintaan tersebut berasal dari penyidik Kejagung.

“Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugasteadi,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan kasus ini diduga melibatkan pegawai dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak.



Ia menegaskan bahwa perkara ini tidak berkaitan dengan program pengampunan pajak pemerintah.

“Itu bukan terkait tax amnesty. Ini hanya memang pengurangan kewajiban pajak. Saya tegaskan bukan tax amnesty, ya,” ucapnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menurut Anang, penyidikan bermula dari laporan masyarakat yang dirahasiakan identitasnya sejak Oktober 2025. Kejagung juga telah melakukan serangkaian pengeledahan.

“Tim penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah lima lokasi berbeda.”

Ia menambahkan tujuan pencekalannya tersebut untuk mencegah pihak terkait bepergian dan menghambat penyidikan.

“Kekhawatiran dari penyidik, seandainya nanti bepergian ke luar negeri, itu akan menghambat proses penyidikan. Itu saja,” katanya.

Saat ini, seluruh pihak yang dicekal masih berstatus saksi, namun penyidikan telah meningkat ke tahap lanjutan.

“Iya (naik sidik),” ucap Anang.

Profil dan Latar Keuangan Para Terseret Kasus

Victor Rachmat Hartono dikenal sebagai figur sentral di balik diversifikasi bisnis Djarum Group. Lahir di Semarang pada 11 Februari 1972, ia merupakan putra sulung

miliarder Robert Budi Hartono, salah satu orang terkaya Indonesia. Ia menempuh studi di University of California dan Northwestern University, serta menjabat sebagai Presiden Direktur Djarum Foundation.

Sementara itu, Ken Dwijugasteadi, yang turut dicekal, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikannya pada 3 Juli 2018, total aset Ken tercatat sebesar Rp3.489.570.000.

Rincian hartanya mencakup tanah dan bangunan senilai Rp2.835.570.000, alat transportasi Rp175.000.000, harta bergerak lainnya Rp356.000.000, kas dan setara kas Rp82.000.000, serta harta lainnya Rp41.000.000. Tidak ada catatan utang dalam laporan tersebut.

Karier Ken dimulai pada 1983 sebagai pegawai Kementerian Keuangan, sebelum akhirnya dilantik menjadi Dirjen Pajak pada 1 Maret 2016 setelah sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas pada Desember 2015.

Sementara itu, pihak Djarum melalui *Corporate Communications Manager* Djarum, Budi Darmawan, menyatakan pihaknya akan mematuhi penyidik Kejaksaan Agung yang mengusut perkara ini.

“Kami, menghormati, patuh dan taat hukum,” kata Budi singkat kepada Aktual.com.

Achmat & Elroby Jawi Fahmi

Pondasi Pemerintahan Kuat, Tetapi Mesin Ekonomi Belum Menyala



Foto: youtube.com/@AktualForum

Golkar menilai pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada pada jalur tepat, baik dalam tata kelola politik maupun arah kebijakan ekonomi. Meski sejumlah program belum menghasilkan capaian jangka pendek, Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan partainya tetap menjadi penopang utama agar agenda pemerintahan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Golkar mengaku tetap memberikan ruang kritik, evaluasi, sekaligus dukungan terhadap kebijakan strategis negara. Dalam wawancara bersama Aktual, Sarmuji menjelaskan pandangannya mengenai ekonomi, politik, hingga

konsolidasi koalisi. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Golkar memotret satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran secara keseluruhan?

Secara umum, kami menilai pemerintahan ini masih berada dalam jalur yang tepat. Banyak program membutuhkan waktu sebelum terlihat dampaknya, karena sifatnya desain jangka panjang, bukan kebijakan instan. Yang penting arah, konsistensi, dan tata kelolanya tidak menyimpang dari tujuan awal.

Apa indikator paling krusial yang membuat Golkar yakin pemerintah tidak keluar jalur?

Indikator utamanya adalah stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi nasional. Meski tantangan global cukup berat, pemerintahan tetap menjaga ruang fiskal dan pengelolaan negara secara terukur. Stabilitas adalah syarat fundamental sebelum berbicara percepatan pembangunan.

Apa masalah ekonomi paling serius saat ini?

Permintaan domestik atau demand masih lemah, bukan persoalan dana atau likuiditas. Bank memiliki uang, tetapi masyarakat dan pelaku usaha menahan konsumsi serta investasi karena rasa aman dan keyakinan ekonomi belum pulih sepenuhnya.

Mengapa masyarakat cenderung menahan spending meski pemerintah memberikan stimulus?

Karena ada persepsi risiko ke depan. Bila orang yakin ekonomi membaik dalam beberapa bulan, mereka akan berani konsumsi atau berinvestasi. Saat keyakinan itu belum terbentuk, stimulus tidak otomatis menciptakan pergerakan ekonomi.

Seberapa efektif injeksi dana pemerintah ke Himbara untuk memperbaiki momentum ekonomi?

Kebijakan ini membantu memperlancar sistem perbankan, tetapi tidak menjawab inti persoalan.

Likuiditas tanpa permintaan hanya menjadi angka di neraca. Ekonomi butuh konsumsi yang bergerak, bukan sekadar ketersediaan dana.

Program apa yang menurut Golkar berpotensi menjadi pengungkit ekonomi lebih cepat?

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) punya karakter sebagai penggerak sektor riil karena menciptakan permintaan langsung terhadap komoditas pangan. Ketika rantai pasok bergerak dari peternak, distributor, sekolah hingga konsumsi, ekonomi rakyat ikut hidup.

Apakah Golkar melihat MBG hanya sebagai program populis?

Tidak. Selama pelaksanaannya efektif dan akuntabel, program ini dapat menjadi fondasi penguatan kedaulatan pangan sekaligus stimulus bagi industri terkait.

Bagaimana Golkar melihat penggunaan SILPA yang besar?

SILPA besar tidak selalu berarti efisiensi—kadang justru menunjukkan kegagalan eksekusi anggaran. Dana publik tidak boleh hanya disimpan, tetapi harus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Apa pandangan Anda mengenai gaya Menteri Keuangan yang lebih agresif dalam pengawasan?

Itu langkah yang positif selama

tetap proporsional. Pemerintah harus memastikan anggaran terserap tepat sasaran, bukan sekadar cepat.

Apakah percepatan belanja negara harus diimbangi kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit?

Tentu. Bank harus tetap prudent. Kredit yang dipaksakan berisiko menciptakan Non-Performing Loan yang kemudian mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dari sisi politik, apa catatan Golkar sepanjang satu tahun ini?

Stabilitas politik terjaga dengan baik. Bahkan ketika muncul friksi di masyarakat, penyelesaiannya relatif cepat sehingga tidak berkembang menjadi krisis berkepanjangan.

Apakah kritik masih memiliki ruang dalam koalisi besar ini?

Masih. Kritik diperlukan agar program pemerintahan tidak berjalan tanpa koreksi. Golkar sendiri memberi masukan pada beberapa kebijakan tanpa hambatan.

Bagaimana dengan pihak yang berada di luar koalisi—apakah peran oposisi hilang?

Kultur politik Indonesia berbeda. Kita tidak mengenal oposisi yang sepenuhnya diametral. Bahkan yang berada di luar pemerintahan pun masih mendukung kebijakan tertentu

bila mereka menilai itu baik.

Kritik publik soal kabinet besar cukup keras. Bagaimana posisi Golkar?

Kabinet besar pasti punya konsekuensi. Dari sisi representasi, itu memperkuat stabilitas; namun dari sudut efisiensi, tentu ada ruang evaluasi. Pemerintah perlu memastikan struktur ini produktif, bukan beban.

Apakah Golkar merasa terancam dengan kompetisi antarpolisi jelang pemilu?

Tidak. Golkar memiliki tradisi kaderisasi internal yang kuat. Rumah yang nyaman membuat kader tidak mudah berpindah.

Bagaimana pandangan Golkar tentang wacana dua periode bagi Presiden Prabowo?

Terlalu dini membicarakannya. Pemerintah harus bekerja lebih dulu dan membuktikan hasil.

Apa pesan reflektif Golkar untuk publik terkait tahun pertama pemerintahan ini?

Kita perlu memberi ruang waktu karena banyak program bersifat jangka panjang. Golkar tetap menjadi penopang sekaligus pengontrol agar kebijakan dijalankan dengan benar. Keberhasilan pemerintahan ini adalah keberhasilan bersama.

Reuni Akbar 212 Digelar Kembali di Monas, Panitia Undang Presiden Prabowo

Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2025 dengan tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjahat.” Ketua *Steering Committee* Ahmad

Shobri Lubis menjelaskan tujuan agenda ini tetap sama seperti awal gerakan.

“Spirit 212 yang dibangun sejak sembilan tahun lalu adalah untuk menguatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah. Spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka tahun ini kita tetap mengadakan Reuni Akbar 212,” kata Shobri.

Format kegiatan tahun ini berbeda karena dimulai setelah Magrib dengan zikir, doa bersama, dan tausiyah. Panitia mengundang Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh

nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Anies Rasyid Baswedan dan Imam Besar Habib Rizieq Shihab juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

“Pak Presiden kami undang.

Kemudian ada tokoh-tokoh yang juga kami undang, misalnya Pak Anies

Baswedan, Pak Sufmi Dasco Ahmad dan Pak Tamsil Linrung,” kata Juru Bicara PA 212, Aziz Yanuar.

“Memang kami fokusnya merajut persatuan dalam pemerintah Pak Prabowo yang baru berjalan,” Aziz menambahkan.

Dari sisi penyelenggaraan, izin resmi telah diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. “Benar, sudah dapat izin dan kami langsung audensi dengan Pak Pramono Anung di Balai Kota langsung,” kata Humas Reuni PA 212, Novel Bamukmin.



Rizky Zulkarnain



ANTARA FOTO/Aprilio Akbar/hp

Mafia Tanah, Celah Hukum dan Perilaku Oknum Aparat

Praktik mafia tanah di Indonesia terus terjadi dan tidak pandang bulu. Korbannya bisa masyarakat biasa, selebritas, pengusaha, hingga lembaga keagamaan. Salah satu kasus terbaru menimpa Yayasan Raudhatul Muta'alimin di Jakarta Selatan.

Tanah wakaf seluas 20.000 meter persegi milik mereka di Sukabumi dijual pihak tak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan pengurus untuk kepentingan proyek Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi). Meski pembebasan lahan telah dilakukan

sejak 2017, proses tukar guling maupun penggantian lahan belum juga terealisasi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Atqo Darmawan Aji, menilai kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah hukum agraria yang belum terselesaikan sejak transisi dari sistem kolonial ke sistem nasional. Banyak tanah di Indonesia belum dikonversi secara legal sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga status kepemilikannya lemah dan rentan dipalsukan.

“Masih ada tumpang tindih alas hak di masyarakat yang menciptakan ketidakpastian hukum,” ujarnya.

Menurutnya, rendahnya literasi hukum masyarakat atas mekanisme sertifikasi juga memperburuk keadaan. Kondisi ini menjadi pintu masuk mafia tanah untuk memalsukan dokumen, menguasai lahan, hingga mengatur proses hukum di pengadilan.

“Mafia tanah masih ada karena masyarakat tidak paham prosedur dan negara belum hadir secara aktif,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyebut salah satu penyebab mafia tanah tumbuh subur adalah usia regulasi yang sudah sangat tua. UUPA 1960 dinilai tidak lagi mampu menjawab kompleksitas persoalan digitalisasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, dan konflik kewenangan antarinstansi.

“Ada puluhan aturan turunan seperti PP Pertanahan, Permen ATR/BPN, aturan kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan semuanya tidak sinkron,” jelasnya.

Politisi PKB itu menilai ruang abu-abu hukum tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengklaim tanah negara, kawasan adat, hingga

permukiman yang telah lama berdiri.

Anggota DPR lainnya, Ujang Bey, menyoroti modus mafia tanah yang kerap melibatkan pemalsuan sertifikat, manipulasi data, hingga kolusi dengan oknum desa dan notaris. Dengan dukungan finansial kuat, mafia tanah lebih mudah memenangkan gugatan hingga tingkat pengadilan tertinggi.

Pengamat sosial-politik

Muhammad Said Didu bahkan

menuding lembaga pertanahan ikut berperan dalam maraknya mafia tanah. Ia menyebut Kementerian ATR/BPN

sebagai “koordinator mafia tanah” karena banyaknya kasus sertifikat ganda dan praktik manipulasi kewenangan.

“Mereka menciptakan pemilik palsu pertama, lalu pemilik palsu kedua, dan sertifikat baru diterbitkan. Oligarki kemudian tampil sebagai korban,” ujarnya.

Mantan anggota Komisi II DPR, Gamari

Sutrisno, menilai mafia tanah bisa beroperasi karena birokrasi pertanahan korup, ada kolusi dengan aparat keamanan, dan lemahnya pengawasan negara. Regulasi yang ada pun, menurutnya, lebih sering menguntungkan investor besar dibanding melindungi hak rakyat.



foto: aktual.com

"Mereka menciptakan pemilik palsu pertama, lalu pemilik palsu kedua, dan sertifikat baru diterbitkan. Oligarki kemudian tampil sebagai korban,"

Erobby Jawi Fahmi, Yassir Fuady

Rehabilitasi Usai Vonis Eks Dirut ASDP

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati, serta dua eks direksi lain, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, Selasa (25/11/2025), setelah DPR menyampaikan aspirasi publik dan kajian terkait proses hukum kasus ASDP sejak Juli 2024.

Sebelumnya, ketiganya telah menjalani proses peradilan terkait dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh ASDP pada 2019–2022.

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Ira dengan pidana 4 tahun 6 bulan dan Yusuf serta Harry masing-masing 4 tahun penjara.

Kerugian negara dalam perkara ini dinilai mencapai Rp1,25 triliun. Dalam putusan, hakim menyebut tidak terdapat aliran dana ke pribadi dan mencatat hal-hal yang dianggap meringankan, termasuk adanya aset hasil aksi korporasi yang masih dapat dimanfaatkan negara.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menjelaskan rehabilitasi tersebut merupakan hak prerogatif presiden sesuai kewenangan konstitusional. Ia menegaskan rehabilitasi berbeda dengan amnesti atau abolisi serta tidak mengubah proses hukum yang telah berjalan.

“Rehabilitasi tidak memengaruhi penegakan hukum yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Ira Puspawati, resmi bebas dari Rutan KPK sekitar pukul 17.15 WIB pada Jumat (28/11/2025). Sebelum pembebasan, tim kuasa hukum dan keluarga telah menunggu di lokasi dan menyambut Ira bersama dua mantan pejabat ASDP lain, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, yang juga memperoleh rehabilitasi dan dibebaskan.

Rizky Zulkarnain



Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Adimaja/tom

foto: <https://cop30.br/>

Aroma Perseteruan **Negara Berkembang** **Vs Negara Maju** di COP30 Brasil

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) resmi dibuka di Belém, Brasil, dengan pesan yang tegas, bahwa laju penanganan krisis iklim dunia masih terlalu lambat.

Selama dua pekan, hampir 200 negara akan bernegosiasi mengenai strategi pengurangan emisi, transisi energi bersih, dan pendanaan bagi negara-negara rentan yang terus terdampak cuaca ekstrem. Presiden



COP30, André Corrêa do Lago, menyebut forum kali ini akan penuh tarik-menarik kepentingan karena transisi energi menyentuh banyak sektor ekonomi dan belum ada negara yang benar-benar siap. Sejak hari pertama, perbedaan kepentingan mulai terlihat. Kelompok Like Minded Developing Countries (LMDC), termasuk Arab Saudi dan India, mendesak negara maju memperjelas komitmen pendanaan.

Mereka juga menyoroti kebijakan perdagangan sepihak seperti pungutan karbon Uni Eropa.

Sementara itu, Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (AOSIS) menuntut tindakan nyata atas laporan PBB yang menyebut dunia semakin jauh dari target pemanasan 1,5°C. Namun, sikap negara kaya minyak seperti Arab Saudi berpotensi menghambat kesepakatan ambisi iklim baru.

Brasil sebagai tuan rumah berusaha meredakan ketegangan dengan menggabungkan berbagai isu dalam satu jalur negosiasi. Pertemuan informal antar kepala delegasi dilakukan untuk mencegah kebuntuan lebih awal.

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mendorong disepakatinya peta jalan global untuk mengakhiri ketergantungan energi fosil. Namun hingga kini, belum ada kejelasan implementasinya. Negara kepulauan kecil seperti Marshall memperingatkan risiko sosial-ekonomi transisi energi global yang tidak merata.

Bayang-bayang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mempengaruhi dinamika pembahasan. AS dipastikan keluar dari Perjanjian Paris pada Januari 2026 dan posisi mereka yang tidak hadir secara formal menguatkan sinyal turunnya kepemimpinan global dalam isu iklim.

Tidak seperti edisi-edisi sebelumnya, COP30 belum memiliki



foto: TikTok/News Today

satu kesepakatan besar yang menonjol. Namun harapan kini tertuju pada agenda adaptasi iklim setelah badai Melissa menyebabkan kerugian besar di Jamaika. Negara-negara berkembang berharap adanya kesepakatan pendanaan baru sebelum konferensi ditutup.

COP30 kembali memperlihatkan jurang antara urgensi ilmiah dan kepentingan geopolitik. Di tengah dinamika politik global, satu fakta tetap tak terbantahkan: planet ini terus memanas dan waktu untuk bertindak semakin sempit.

Rizky Zulkarnain



Foto: iSt

Kembali pada Esensi Dakwah yang Berbasis Akhlak

Belakangan ini, pendakwah menjadi sorotan dan kritik masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi karena adanya perilaku sebagian pendakwah yang tidak sesuai dengan nilai yang mereka sampaikan. Ada yang fasih berbicara tentang akhlak, namun perilakunya bertolak belakang. Ada yang menyeru kesederhanaan, namun hidup bermewah-mewahan. Bahkan ada yang terjatuh skandal moral.

Allah SWT berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah (*manusia*) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik.” (QS. An-Nahl [16]:125).

Ayat ini menegaskan pentingnya hikmah dalam berdakwah, bukan hanya bijak dalam kata, tetapi juga dalam tindakan. Seorang da'i memiliki

otoritas simbolik. Apa yang ia lakukan dapat dianggap sebagai perilaku yang patut dicontoh oleh umat.

Teori *social cognitive* dari Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar dengan mengamati. Seperti anak yang melihat permainan baru: ia mengamati, lalu meniru. Begitu pula jamaah akan meniru perilaku pendakwah, terutama dalam hal batasan agama. Jika pendakwah melanggar norma, jamaah bisa menganggap pelanggaran itu sebagai hal yang diperbolehkan.

Karena itu Allah SWT memperingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ ۚ كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan.” (QS. Ash-Shaf [61]: 2-3)

Dakwah adalah amal mulia. Rasulullah SAW bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً



foto: albertbandura.com

Teori *social cognitive* dari Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar dengan mengamati. Seperti anak yang melihat permainan baru: ia mengamati, lalu meniru. Begitu pula jamaah akan meniru perilaku pendakwah, terutama dalam hal batasan agama.

“Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat.” (HR. Bukhari).

Namun dakwah bukan hanya ucapan. Ia harus diiringi keteladanan. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang Muslim.’” (QS. Fussilat [41]: 33).

Urutannya jelas: menyeru kepada Allah → beramal → mengaku sebagai Muslim. Keteladanan adalah

bukti keimanan.

Umar bin Khattab berkata:

لَا يَغُرَّتْكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ... وَلَكِنْ انظُرُوا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِ

“Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Qur’an... lihatlah siapa yang mengamalkannya.”

Wallahu a’lam.



IKUTI TERUS
DISKUSI PUBLIK BERBAGAI TOPIK TERKINI DAN MENARIK
HANYA DI:

aktual forum

Dialog Publik yang digelar setiap bulan secara hybrid (online dan offline)
di Channel YouTube aktualforum dan Cafe Warung Aceh Garuda (WAG)

Kolaborasi: 813-1019-7365

aktual.com | aktual forum
TEKANGAT TERPERCAYA

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM | YLBHI

- Komjen Pol Oegroseno (Mantan Wakapolri)
- Muhammad Isnur (Ketua YLBHI)
- Ifti (P)

MEMBEDAH PASAL KRUSIAL DI RUKHAP

aktualofficial | Aktual.com | Aktual Forum | aktual.com

aktual.com | aktual forum
TEKANGAT TERPERCAYA

KOCOK ULANG
KABINET PRABOWO

5 MENIT LAYAK
DIRESUME

- Nailul Huda (Direktur Ekonomi Celso)
- Ahmad Hojin (Program Pusat, Puspoli)



Saksikan dan Ikuti Terus
Channel YouTube

aktualforum



Mengupas Berbagai Isu Terhangat dan Menjadi Perhatian Publik

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Partnership/kolaborasi: 081310197365